



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 5 Pontianak, Kalimantan Barat 78116  
Telepon (0561) 732771, 739684 Fax (0561) 732690  
Laman [www.kalbarprov.go.id](http://www.kalbarprov.go.id). Pos-el [diskopukm@kalbarprov.go.id](mailto:diskopukm@kalbarprov.go.id).

---

Pontianak, 30 Agustus 2024

Nomor : 500.3.2/1710/DISKOPUKM.A  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Daftar Informasi Publik Dikecualikan

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat  
di  
tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 500.12.18.1/34/DISKOMINFO.IP Tanggal 22 Agustus 2024 tentang Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan, serta dalam rangka Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka bersama ini dengan hormat kami sampaikan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

\$(ttd)

Drs. Junaidi, MM  
Pembina Utama Madya/(IV/d)  
NIP. 196508091986031012

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Laporan Keuangan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU 9 Tahun 2017 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan</li> <li>- UU 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 17, Pasal 20 ayat 2</li> <li>- UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 3.c</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menimbulkan penyalahgunaan bagi pihak tidak bertanggung jawab, terkait kepentingan anggota sebagai pemilik usaha koperasi sehingga dapat menjadi kendala keberpihakan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membatasi akses untuk sharing data antara stakeholder pembina Koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama Diperlukan</li> </ul>

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2	By Name By Address /Data Pribadi spesifik pelaku UMKM dan pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi Pasal 35 s/d Pasal 38</li> <li>- UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 3.c</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menimbulkan penyalahgunaan bagi pihak tidak bertanggung jawab, terkait intervensi terhadap perlindungan perkembangan usaha mikro kecil untuk naik kelas menjadi usaha menengah sehingga dapat menjadi kendala keberpihakan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membatasi akses untuk sharing data antara stakeholder pembina UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama Diperlukan</li> </ul>

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3	Data Keuangan Perkembangan Usaha/Pendapatan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi Pasal 4, Pasal 35 s/d Pasal 38</li> <li>- UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 3.c</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menimbulkan penyalahgunaan bagi pihak tidak bertanggung jawab, terkait intervensi terhadap perlindungan perkembangan usaha mikro kecil untuk naik kelas menjadi usaha menengah sehingga dapat menjadi kendala keberpihakan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membatasi akses untuk sharing data antara stakeholder pembina UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama Diperlukan</li> </ul>

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4	Hak Cipta, Merek, Hak Paten (Hak Kekayaan Intelektual) Koperasi UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</i></li> <li>- <a href="#">UU No.14 Tahun 1997</a> tentang Merek</li> <li>- <a href="#">UU No.13 Tahun 1997</a> tentang Hak Paten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat menimbulkan penyalahgunaan bagi pihak tidak bertanggung jawab, terkait intervensi terhadap perlindungan perkembangan usaha mikro kecil untuk naik kelas menjadi usaha menengah sehingga dapat menjadi kendala keberpihakan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi UMKM, serta persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membatasi akses untuk sharing data antara stakeholder pembina UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama Diperlukan</li> </ul>

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,



Drs. Junaidi, MM  
Pembina Utama Madya/(IV/d)  
NIP. 196508091986031012